

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sampai saat ini demokrasi telah menjadi pilihan dalam sistem politik negara-negara di barat, dan Amerika Serikat senantiasa berada digaris depan demokrasi. Sejak muncul dalam bentuk paling sederhana -negara polis yunani-, demokrasi tetap diyakini sebagai salah satu sistem politik paling ideal hingga sekarang oleh para pengikutnya. Bicara demokrasi tentu dunia akan melihat Amerika Serikat yang sering dianggap sebagai tolak ukur demokrasi. Demokrasi diyakini oleh bangsa Amerika Serikat sebagai prinsip dasar pembangunan watak bangsa. Hanya lewat partisipasi politik secara penuh dari setiap individu maka sebuah bangsa dapat mengembangkan diri sepenuhnya. Dalam konteks ini diktator mustahil diterima sebagai sebuah kenyataan hidup di Amerika Serikat.¹ Amerika Serikat memiliki pemerintahan yang berbentuk Republik. Presiden, para anggota Parlemen dan sebagian pejabat negara penting lainnya, dipilih oleh rakyat. Inilah mungkin sesuatu yang sesuai dengan pendapat Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Namun ada kenyataan yang cukup menarik, pelaksanaan demokrasi di Amerika Serikat tidak lah murni berasal dari suara rakyat. Setidaknya Kondisi ini bisa diperhatikan dalam situasi politik Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush (2001-2004). Dalam demokrasi di Amerika Serikat, uang

¹

memainkan peran penting. Paul street, penulis buku '*Kapitalisme dan Demokrasi*', menyatakan 'para calon yang menang dalam kompetisi pengumpulan dana, kemungkinan besar akan memenangkan Pemilu'.² Penguasaan orang-orang ber-uang dalam Pemilu Amerika Serikat menyebabkan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam memimpin, namun tidak memiliki sumber dana atau tidak ingin bekerjasama dengan para kapitalis, menjadi hanya berpeluang kecil untuk memenangkan Pemilu.

Kondisi ini memancing kritikan dari para pemikir dan penulis Amerika Serikat sendiri. Seorang penulis Amerika Serikat, William Pfaff, menjelang Pemilu kepresidenan tahun 2000 –dimana akhirnya Pemilu dimenangkan oleh George W.Bush-, menulis bahwa kita berhadapan dengan kenyataan bahwa Amerika Serikat sudah berubah menjadi negara kapitalis, bukan demokratis. Hal ini juga ditekankan oleh Paul Street yang menyatakan bahwa orang-orang yang bersuara lantang dihadapan kapitalis akan kesulitan meraih kursi diparlemen. Perlahan namun pasti, demokrasi di Amerika Serikat diatur oleh para kapitalis.³

Kebijakan-kebijakan negara pun tidak lagi mutlak berasal dari aspirasi rakyat. Kebijakan negara yang dibuat elit politik sangat dipengaruhi cara pandang elit politik itu sendiri dan juga kepentingan elit korporat / kapitalis. Dalam perspektif elit, suara-suara masyarakat yang kontra produktif dengan kapitalis hanya akan berada di urutan kedua untuk diperhatikan. Sehingga peran negara yang aspiratif demokratis tidak lagi berjalan selayaknya. Klaim bahwa elit politik

² *Demokrasi ala Amerika Serikat* lihat dalam

disebabkan oleh Hegemoni elit pada masa pemerintahan George W. Bush. Ada banyak persoalan dan pelanggaran demokrasi yang 'termaafkan dan terlupakan' yang seharusnya menjadi kajian penting mengingat Amerika Serikat selalu menganggap dirinya sebagai juaranya demokrasi. Ini sekaligus menjadi kritikan bagi Amerika Serikat yang selalu mencari kesalahan pada negara-negara lain.

2. Sebagai aplikasi atas teori-teori serta mata kuliah yang pernah penulis peroleh selama kuliah di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar strata S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Permasalahan

Bagi bangsa Amerika Serikat, demokrasi merupakan jiwa bangsa. Bangsa Amerika Serikat meyakini bahwa keagungan manusia hanya mungkin terwujud jika masyarakat memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada setiap individu untuk ikut serta dalam pembentukan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Setidaknya itulah pemahaman dasar bangsa Amerika Serikat akan demokrasi yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke (1632-1704) tersebut, dimana hak dan kebebasan menjadi dasar dari demokrasi. Amerika Serikat sering membanggakan diri sebagai '*Champion of democracy*' (juara demokrasi) dengan

tradisi yang kokoh sejak diproklamirkannya deklarasi kemerdekaan 4 Juli 1776-hingga kini. Amerika Serikat senantiasa mendengungkan tekadnya untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi diseluruh dunia.⁴

Sejak berdiri sebagai sebuah negara, demokrasi Amerika Serikat juga mengalami pasang surut, tidak lepas dari berbagai persoalan. Kondisi krisis dalam politik Amerika Serikat bukanlah persoalan baru, pelanggaran terhadap demokrasi bukan lah wacana baru di Amerika Serikat. Dari presiden Lincoln yang mengatakan , “ pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, hingga presiden Rutherford B. Hayes yang mengomentari pemerintahannya dengan mengatakan, “ ini adalah pemerintahan dari perusahaan, oleh perusahaan dan untuk perusahaan”, dimana suara bisa ditawar dan peraturan bisa dibeli ataupun dijual. Pada abad 20, dunia politik Amerika Serikat masih mengalami perjalanan berat. Watergate, kematian John F.Kennedy, perang Vietnam, dan perang dingin menjadi dinamika yang mewarnai demokrasi Amerika Serikat saat itu. Hingga sekarang pun, usai perang dingin,demokrasi tetap pasang surut, bahkan pada masa George W. Bush. Walaupun dunia luar melihat Amerika Serikat sebagai contoh negara demokratis yang paling ideal, dan Amerika Serikat selalu menganggap dirinya sebagai jagonya demokrasi, pada kenyatannya ada realitas yang ironis terjadi di Amerika Serikat.

Pemerintahan George W. Bush merupakan sebuah kasus menarik untuk ditelaah dalam konteks demokrasi. Dalam konteks negara demokrasi, pemerintahan George W. Bush penuh kontroversi, proses awal hadirnya

pemerintahan ini saja sudah menimbulkan polemik politik. Disaat Amerika Serikat dengan gencar mengirimkan tim-tim pengawas pemilihan umum ke berbagai negara, pemilihan umum di Amerika Serikat sendiri mengalami berbagai persoalan, tidak lepas dari berbagai penipuan dan skandal. Dalam Pemilu Presiden tahun 2000, terjadi persoalan dalam penghitungan suara sehingga George W. Bush menang tipis dari saingannya. Setelah terjadi protes dan tuntutan hukum dari kandidat yang kalah, pengadilan Amerika Serikat memutuskan bahwa Bush berhak menjadi Presiden. Hal ini dianggap sebagai sebuah kecurangan oleh lawan George W. Bush. Banyak pengamat mengatakan George W. Bush menang bukan karena mayoritas rakyat Amerika Serikat memilihnya, melainkan karena dimenangkan oleh pengadilan.⁵ Disinilah *Doktrin China* terjadi ; kuasai ekonomi untuk menguasai yang lain. George W. Bush adalah seorang pengusaha besar di dunia. Dalam Pemilu di Amerika Serikat kemampuan kandidat untuk melakukan kampanye tergantung pada pencarian dana dari perusahaan, dana kampanye George W. Bush adalah 191 juta dollar.⁶ Mungkin hal seperti ini lah yang dikhawatirkan oleh Street.

Dalam bahasa lebih ekstrem, melalui bukunya "*Stupid White Men*" Sutradara Michael Moore menyebutkan bahwa kemenangan George W. Bush dalam Pemilu kepresidenan tahun 2000 sebagai sebuah kudeta. Dia mengatakan bahwa Al Gore, saingan George W. Bush saat itu, telah memperoleh 540.000 suara lebih banyak.. Dalam Pemilu tersebut, jika dua calon utama mendapat suara

⁵ <http://www.irib.ir/worldservice/melayuradio/perspektif/2004/maret04/Demo-AmerikaSerikat.htm>

Grany D menolak apa yang disebut 'uang lunak'-bantuan yang awalnya dimaksudkan untuk biaya tambahan pemerintah- yang menjadi faktor utama dalam proses pemilihan umum Amerika Serikat. Para analis memperkirakan bahwa sumbangan uang lunak pada pemilihan umum 2000 mencapai 393 juta dollar. Aktivis-aktivis di Amerika Serikat menganggap sistem uang lunak sebagai suap yang disahkan.

Kemenangan Pemilu presiden tahun 2000 tersebut memulai hegemoni elit yang berada dalam kelompok George W. Bush. Bersama kelompok Neo-Konservatifnya, yang merupakan sayap utama dipartai Republik, George W. Bush pun memasuki Gedung putih sejak januari 2001. George W. Bush bersama kelompok Neo-Konservatifnya menyimpan ambisi mewujudkan sebuah imperium global dibawa payung *Pax-Americana*. Pemerintahan ini memulai pekerjaannya dengan menghadapi tragedi 11 September, suatu tragedi besar yang menimpa bangsa Amerika Serikat. Namun, peristiwa yang mengejutkan bangsa Amerika Serikat dan juga dunia itu justru dimanfaatkan oleh George W. Bush dan pemerintahannya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang tidak rasional, yakni perang. Dengan mengusung isu terorisme, George W. Bush dan kelompoknya –yang sebenarnya sudah menyusun agenda perang sebelum George W. Bush terpilih sebagai presiden- memanfaatkan momen tersebut untuk melegalkan tindakan mereka. Afghanistan menjadi sasaran pertama, Perang ini tentu saja menjadi sorotan masyarakat dunia, rakyat Amerika Serikat sendiri menolak agresi militer yang dilakukan negaranya, ribuan orang turun kejalan untuk menolak agresi ini. Bagaimana mungkin sebuah tragedi dilanjutkan dengan

menciptakan tragedi lagi. Rakyat Amerika Serikat menyadari bahwa perang bukanlah sebuah pilihan logis, mereka percaya bahwa demokrasi tidak pernah mengajarkan perang sebagai jalan keluar, jalan damai adalah jalan utama bagi negara yang menyebut dirinya negara demokrasi bagaimana pun caranya.

Dalih perang melawan teror juga diikuti dengan pembatasan kebebasan sipil di dalam negeri Amerika Serikat. Bahkan dilakukan penahanan sementara terhadap orang-orang yang dituduh teroris tanpa menyebutkan nama mereka agar tidak diketahui publik. Tindakan ilegal ini pun mendapat perhatian dari kelompok pembela hak-hak sipil, mereka meminta kepada pemerintah supaya nama-nama tahanan itu diumumkan, namun kelompok Neo-Konservatif menentang keras. Media pun bungkam. Sebagian besar media dengan loyal menadahi informasi dari sumber-sumber resmi pemerintah yang sudah dipelintir, tanpa merasa perlu untuk mempertanyakannya. Dalam situasi ketakutan yang diciptakan George W. Bush, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dan geng Neo-Konservatif, mengatakan bahwa suara kritis sama artinya dengan tidak patriotik dan tidak mendukung perang melawan teror. Partai Republik yang berisi kapitalis-kapitalis raksasa berhasil menekan media untuk mendukung kebijakan-kebijakan George W. Bush. Bahkan, Jaringan televisi milik konglomerat media Rupert Murdoch, FOX News, terang-terangan menjadi pemandu sorak pro-perang.⁸

Pemerintahan George W. Bush terus membujuk rakyatnya untuk membenarkan tindakannya ini –terlepas berhasil atau tidak bujukan itu, bagi George W. Bush dan kelompoknya, keputusan tetap ditangan mereka- melalui

media-media yang telah menjadi bagian dari kelompok bush. Setelah Washington selesai dengan Afghanistan, Irak pun menjadi target selanjutnya. Sedikit berbeda dengan Afghanistan, Penyerangan Irak dilakukan dengan mengusung isu senjata pemusnah massal. Perang Irak dilakukan dengan menipu rakyat Amerika Serikat, dan kebohongan yang sama dinyatakan terang-terangan oleh Menteri Luar Negeri Colin Powell di PBB saat itu, dengan menyatakan perang itu untuk memusnahkan senjata pemusnah massal milik Saddam Hussein yang bisa membahayakan keamanan dunia. Media arus utama diam dan malah mengirimkan reporter mereka ikut melaporkan dari kendaraan lapis baja militer Amerika Serikat yang menyerbu Irak. Awak redaksional nyatanya tak seperkasa seperti yang terlihat dari luar, pasalnya kekuasaan elit korporat pemilik media jauh lebih dominan. Terbelenggunya media oleh hegemoni elit politik dan elit korporat jelas menampakkan kondisi tak sehat dalam demokrasi Amerika Serikat, mengingat bahwa media merupakan pilar keempat demokrasi.

Selain tujuan politik, tujuan invasi Amerika Serikat ke Timut Tengah juga diyakini oleh berbagai pihak bermotif ekonomi –pengertian ekonomi selain perang sebagai proyek bagi kelompok militer dan elit korporat-, yakni untuk menguasai ladang-ladang minyak Irak guna mendukung ambisi pembentukan "kekaisaran Amerika Serikat". Jadi, tidak benar jika invasi ke Irak dilakukan lantaran Saddam Hussein terlibat dalam serangan teroris 11 September 2001, atau karena kepemilikan senjata pemusnah massal. George W. Bush dan para kroninya bahkan tidak mampu mempertanggungjawabkan milyaran dollar proyek

sebagai negara demokrasi yang bersih dari para koruptor besar. Bahkan, seorang jenderal Amerika Serikat di Irak dipecat lantaran mencoba membongkar korupsi di tubuh para kroni George W. Bush. John Kluitz, seorang penulis Italia yang melakukan penelitian tentang Amerika Serikat menyatakan, “ Saya telah tinggal bertahun-tahun di Amerika Serikat, dan saya mendapati apa yang dikatakan sebagai sebuah demokrasi sebenarnya tidak terwujud di Amerika Serikat, yang ada hanyalah demokrasi palsu dan kamufase. Mereka yang menentang pemerintahan Bush di Amerika Serikat akan ditekan dan terkucil dari dunia politik dan berita “. ⁹

George W. Bush dan kelompok Neo-Konservatifnya pun merumuskan kebijakan pengurangan pajak dan semakin meningkatkan biaya militer dan keamanan. Kebijakan yang disahkan karena mendapat dukungan dari partai Republik yang menguasai kongres ini pun hanya menguntungkan kelompok pengusaha saja. Undang-undang pengurangan pajak dan peningkatan biaya militer dan keamanan telah menyebabkan defisit bujet terus membengkak. ¹⁰ Demi kebijakan ini, George W. Bush telah menelantarkan banyak sekali program sosial. Bush pun mendapatkan kritikan keras dari kelompok-kelompok pembela hak sipil warga kulit berwarna Amerika Serikat. Kelompok ini menggelar demonstrasi besar-besaran ketika George W. Bush melakukan kunjungan ke Atlanta untuk menziarahi makam pejuang kulit hitam Martin Luther King. Para demonstran meneriakkan slogan-slogan menentang perang Irak dan mengecam

⁹ *Demokrasi ala Amerika Serikat* lihat dalam

keras kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang merampas hak warga sipil dan mengurangi subsidi terhadap berbagai program sosial hanya untuk menjalankan program perang.

Hegemoni elit meluas pada wilayah kebebasan sipil, hak-hak sipil, rasial dan agama.. Diakhir 2003, Juru Bicara Kepolisian Federal Amerika Serikat, FBI, mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengawasi aktivitas kelompok sipil anti-perang. Tetapi, para pendukung kelompok sipil tersebut menolak tuduhan FBI ini dan menyatakan bahwa tindakan itu dilakukan dalam rangka menumpas kelompok oposan Gedung Putih. Masyarakat Amerika Serikat telah berhadapan dengan masalah keterbatasan kebebasan sosial dan individu selepas tragedi 11 September. Di antara program keamanan pemerintah Amerika Serikat ialah mengesahkan undang-undang rasialis, meliburkan organisasi sosial umat Islam, memperpanjang masa tahanan, memata-matai warga negara, menginvestigasi rumah-rumah, dan membuka surat elektronik para warga Amerika Serikat.

Dengan memanfaatkan tragedi 11 September, George W. Bush bersama kelompoknya membangun isu bahwa Islam sebagai agama yang harus diwaspadai. Kongres Amerika Serikat yang masih didominasi partai Republik pun mengambil langkah yang anti Islam. Pemeriksaan pun dilakukan pada lembaga-lembaga Islam yang sudah tentu mendapat kecaman dari berbagai kelompok Islam di Amerika Serikat. dan menyatakan tindakan tersebut sebagai aksi diskriminatif terhadap umat Islam. Selepas Peristiwa 11 September, Pemerintah dan Kongres Amerika Serikat secara bertahap telah melaksanakan

115 | *Journal of Islamic Studies* | Volume 1, No. 1, 2014

hitam peristiwa 11 September. Penutupan sebagian lembaga sosial Islam dan penyitaan harta-benda pun dilakukan, diikuti pengawasan terhadap para mahasiswa muslim dan Arab di berbagai universitas. Kebebasan beragama tidak dapat dirasakan oleh umat muslim pada masa George W. Bush.

Periode pertama pemerintahan George W. Bush (2001-2004), berisi kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan demokrasi. Banyak terjadi pelanggaran akan demokrasi yang terjadi sebagai akibat dari dominasi George W. Bush bersama kelompok elitnya, dalam hal ini kelompok Neo-Konservatif, dan juga para elit korporat (kapitalis). Pemerintahan yang dimulai dengan kecurangan Pemilu ini -dalam Pemilu ini hanya 51% warga Amerika Serikat yang menggunakan hak pilihnya Lebih dari 90 juta warga negara Amerika Serikat sama sekali tidak berpartisipasi dalam pemilihan¹¹- telah secara perlahan menciptakan krisis demokrasi dalam negaranya sendiri. Prinsip-prinsip dasar demokrasi Amerika Serikat seperti kebebasan berbicara (*freedom to speech*), kebebasan beragama (*freedom to religion*), kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*) dan kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*) dicerai oleh sekelompok elit penguasa negara. Warga Amerika Serikat tak lagi bebas bicara ketika mereka terus diawasi oleh agen-agen pemerintah, warga negara Amerika Serikat yang menganut agama Islam pun jadi korban karena dugaan-dugaan yang tidak kuat, George W. Bush menghilangkan prinsip toleransi beragama dengan menutup lembaga-lembaga Islam dan mengawasi orang-orang Islam di Amerika Serikat. Media yang menjadi pilar keempat dalam demokrasi modern pun terbawa arus

¹¹ Noreena Hertz (2005), *op.cit.* hal 135.

hegemoni George W. Bush dan kelompoknya. Bahkan George W. Bush menciptakan rasa takut di dalam rakyatnya sendiri dengan memanfaatkan kata 'terorisme'.

Salah satu prinsip penting kekuasaan negara seperti yang diutarakan John Locke, dimana legitimasi negara harus berbasiskan pada kepercayaan rakyat, sehingga negara, melalui pemerintah sebisa mungkin harus mengakomodir segala kepentingan dan tuntutan rakyatnya tidak berjalan semestinya pada Masa George W. Bush. Dominasi George W. Bush, kelompok Neo-Konservatif, dan Elit Korporat (Kapitalis) yang semuanya berakar pada Partai Republik benar-benar tak terbantah, dan ini menyebabkan dinamika tak sehat dalam demokrasi liberal Amerika Serikat yang oleh para pemimpin Amerika Serikat sendiri selalu dibangga-banggakan sebagai demokrasi yang paling ideal didunia. Sepertinya George W. Bush harus mengkoreksi perkataannya yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sebagai representasi dari kemerdekaan hidup, demokrasi , jaminan hak-hak asasi dan toleransi, sedangkan Terorisme sebagai representasi tirani, prasangka dan kebencian, pelecehan terhadap martabat manusia, kemerdekaan dan hidup. Karena dengan sikap-sikap yang dilakukan George W. Bush dan kelompoknya, secara tak langsung telah mengatakan bahwa mereka

“...”

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan suatu pokok permasalahan yang menjadi fokus penulisan skripsi ini, yaitu : *Faktor apa yang menyebabkan terjadinya krisis demokrasi di Amerika Serikat pada masa George W. Bush dan apa yang menjadi indikasinya ?*

E. Kerangka Teoritik

Kata teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperhatikan”. Secara gampang bisa dikatakan bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Secara lebih spesifik, McCain dan Segal mendefinisikan teori sebagai serangkaian statemen yang saling berkaitan...(yang terdiri) 1) kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu; 2) kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep dasar itu satu sama lain; dan 3) kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empirik (yaitu hipotesis).¹² Sedangkan konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu, atau secara lebih sederhana, dapat dimaknai konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan.¹³ Untuk menganalisa fenomena krisis demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada masa George W. Bush (2000-2004) ini, penulis menggunakan teori dan konsep demokratisasi, teori elit dan juga konsep hegemoni.

Konsep dan teori Demokratisasi

Definisi demokrasi sangatlah luas, penulis mencoba memilih beberapa pandangan yang menarik akan demokrasi. Menurut Robert Dahl, sistem politik demokrasi adalah suatu sistem politik yang benar-benar atau hampir mutlak bertanggung jawab ke semua warga negaranya.¹⁴ Ada kemampuan untuk menengahi kepentingan-kepentingan yang berkompetisi sehingga terjadi keseimbangan sosial. Dalam masyarakat demokrasi tercipta sistem kelas yang terbuka, kompetisi yang sehat, kemakmuran ekonomi, tingkat industrialisasi yang tinggi, serta pendidikan yang memadai. Demokrasi memiliki budaya-budaya positif, seperti penyelesaian konflik secara damai dan melembaga, jaminan terjadinya perubahan secara damai, pembatasan penggunaan kekerasan secara minimal, hubungan sosial yang egaliter, toleransi terhadap segala perbedaan, kompromi dan akomodatif maupun bersedia mengakui kekalahan. Demokrasi tidak berakhir bersamaan dengan berakhirnya pemungutan suara di Pemilu, dimana selanjutnya arah kebijakan hanya ditentukan oleh kelompok pemenang Pemilu. Pemaksaan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, seperti kebijakan perang dan pemaksaan sistem politik merupakan bentuk pengingkaran demokrasi. Ketika terjadi pengingkaran terhadap komitmen-komitmen demokrasi tersebut, maka demokrasi itu akan kehilangan maknanya sendiri.

Robert Dahl mengemukakan bahwa ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Dahl mengatakan paling tidak ada delapan hal cerminan

demokrasi, yakni ;¹⁵ Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul), Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat), Hak memilih dan dipilih, Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik, Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberikan dukungan, Alternatif sumber-sumber informasi, Pemilu yang bebas, jujur dan adil, dan terakhir Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

Dari konsep demokrasi tersebut dapat dipahami sebaik apa demokrasi Amerika Serikat pada masa George W. Bush. Akan dapat diketahui sejauh mana Amerika Serikat memenuhi syarat-syarat demokrasi untuk kemudian dapat disebut sebagai negara yang demokratis. Pada masa George W. Bush ini terdapat banyak pelanggaran terhadap demokrasi, seperti tidak terciptanya Pemilu yang bebas, jujur dan adil pada saat George W. Bush memenangkan Pemilu. Adalah kelompok elit pendukung George W. Bush yang menyusun kecurangan tersebut sehingga George W. Bush bisa sampai di Gedung Putih. Pengawasan terhadap organisasi Islam merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berorganisasi. Kebijakan perang, pengawasan terhadap kelompok-kelompok tertentu, ataupun pengekanan terhadap media bukanlah tindakan yang sejalan dengan demokrasi. Dari delapan syarat cerminan demokrasi yang disampaikan oleh Dahl, setidaknya setengahnya tidak tercerminkan semasa pemerintahan George W. Bush. Kebebasan membentuk organisasi, kebebasan berekspresi, hak

memilih, alternatif sumber-sumber informasi yang bebas, pemilu yang jujur dan adil serta kebijakan pemerintah yang merujuk pada suara rakyat tidak tercerminkan dalam pemerintahan George W. Bush.

Selain syarat-syarat demokrasi yang dikemukakan oleh Dahl, Amerika Serikat pada sejatinya telah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang merupakan pondasi bangsa Amerika Serikat menjalankan kehidupan berdemokrasi mereka, yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik prinsip demokrasi tersebut ditegakkan. prinsip-prinsip itu dikenal dengan istilah *Four Freedoms*. Pada tahun 1941, Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, dengan tegas memaparkan *Four Freedoms* sebagai Berikut :¹⁶

1. Kebebasan berbicara (*freedom to speech*)
2. Kebebasan beragama (*freedom to religion*)
3. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*)
4. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*)

Pada masa George W. Bush, semua prinsip dasar demokrasi bangsa Amerika Serikat tersebut dilanggar sebagai akibat dari hegemoni elit yang memaksakan kepentingannya. Masyarakat Amerika Serikat dihalang-halangi untuk berdemo, kebebasan bicara di batasi. Kelompok agama, dalam hal ini ; Islam, menjadi korban prasangka George W. Bush dan kelompoknya. Toleransi beragama pun terabaikan. Kebijakan perang dan pengurangan pajak yang dilakukan menyebabkan defisit pada negara, meningkatkan angka pengangguran, dan hak-

¹⁶ <http://www.fourfreedoms.org/> Diunduh pada 11/05/2012

menciptakan ketakutan pada warganya sendiri dengan isu ancaman teror. Pelanggaran-pelanggaran terhadap konsep *Four Freedoms* inilah yang akan menjadi pokok analisa penulis dalam memahami krisis demokrasi Amerika Serikat. Dimana pelanggaran terhadap *Four Freedoms* yang dilakukan oleh George W. Bush dan kelompoknya sebagai pemegang kekuasaan itu sendiri telah menjauhkan bangsa Amerika Serikat dari demokrasi yang mereka bangga-banggakan.

Dari sudut pandang ekonomi, Seymour Martin Lipset melihat demokrasi memiliki korelasi positif antara pembangunan ekonomi dan munculnya demokrasi disuatu negara. Dikatakan, “semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula kemungkinan munculnya demokrasi dinegara tersebut”.¹⁷ Dari teori Lipset, Amerika Serikat sangat tepat untuk dikategorikan sebagai negara demokratis, secara ekonomi, Amerika Serikat merupakan negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang sangat tinggi. Teori ini terlihat sangat positif dan sederhana, pertumbuhan ekonomi akan menciptakan demokratisasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berkorelasi dengan prevalensi sistem politik demokrasi. Tidak mungkin kemakmuran tergantung pada demokrasi, dan jika ada suatu hubungan, demokrasi lah yang harus tergantung pada kemakmuran. Pada tahapan inilah demokratisasi menjadi rawan, ketika demokrasi bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Di negara liberal seperti Amerika Serikat, Perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh satu kelompok, yakni elit korporat atau kapitalis. Demokrasi tergantung pada pertumbuhan

ekonomi, pertumbuhan ekonomi tergantung pada Kapitalisme. Maka yang terjadi, demokrasi dikendalikan oleh kapitalis. Inilah yang dikatakan Marxis, bahwa demokrasi adalah demokrasi borjuis yang mencerminkan kepentingan kelas sosial tertentu.¹⁸

Teori Elit

Teori Elit dianggap sebagai teori yang bertolak belakang dengan demokrasi. Teori Elit menurut Gaetano Mosca ; Dalam setiap masyarakat selalu terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama adalah Elit, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati fasilitas. Kelas kedua adalah Massa, diatur dan dikendalikan oleh elit.

Kelompok elit cenderung bersifat :

- Homogen, mempunyai latar belakang yang hampir sama.
- Utuh dan bersatu.
- Eksklusif, dimana memiliki kesadaran kelompok yang tinggi.
- Otonom, Kebal terhadap gugatan dari luar kelompoknya.

Elit berada dalam satu paket antara penguasa politik dan bisnis / ekonomi. Kelas Elit selalu diberi kesempatan menikmati kekayaan dan kekuasaan dengan dalih demokrasi. Demokrasi itu sendiri telah dipelintir menjadi lain atau telah dibajak untuk kepentingan segelintir Elit.¹⁹ Bila Massa marah, mereka hanya akan menampung keluhan-keluhan Massa tersebut tanpa perlu menjalankannya, sambil berkata bahwa “inilah proses berdemokrasi”. Karena sifatnya yang eksklusif,

¹⁸ Roy C.Macridis, Bernard E.Brown (1992), *ibid.* hal 89

otonom dan mampu memonopoli kekuasaan maka para Elit cenderung tidak memperhatikan pendapat dan pandangan rakyat. Para elit menterjemahkan sendiri kebijakan-kebijakan publik seperti halnya kepentingan nasional sehingga yang tercipta kebijakan-kebijakan yang tidak populis.

Melalui teori elit ini dapat dipetakan kelompok mana yang dapat dikatakan sebagai elit. Dalam persoalan ini, yang dimaksudkan kelompok elit adalah George W. Bush dan kelompok Neo-Konservatifnya (secara politik), yang juga didukung oleh elit korporat (kapitalis besar - secara ekonomi) yang semuanya berbasis pada partai Republik yang menjadi pemenang dalam Pemilu Amerika Serikat tahun 2000. Mereka lah yang menjadi kelas Penguasa (*the Rulling class*) dalam masa pemerintahan George W. Bush ini. Kelompok ini memiliki cara pandang sendiri dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara, posisi mereka yang berada sebagai penguasa memberikan mereka peluang dalam memonopoli dan mendominasi kebijakan.

Konsep Hegemoni

Titik awal konsep Antonio Gramsci tentang hegemoni adalah, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi.²⁰ Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kemampuan untuk mengakomodasi semua kepentingan kelompok lain sehingga mereka mau memberikan dukungan serta berpartisipasi. Dengan jalan inilah kekuasaan dapat dicapai dan dipertahankan. kekuasaan dijalankan secara dominan dalam arti bahwa kekuasaan tertentu mampu mengontrol dan menguasai

kelompok lain. Gramsci menyatakan akseptasi kelompok yang didominasi oleh dan dengan keberadaan kelompok dominan berlangsung dalam proses yang damai tanpa represi kekerasan.

Hegemoni terjadi bukan sekedar melalui pemusnahan kelas lain tapi juga melalui artikulasi budaya dan afiliasi ekonomi-politik masyarakat. Ini berarti bahwa proses kekuasaan dan hegemoni tidak hanya bersifat material tapi juga bersifat kultural. Hegemoni yang bersifat immaterial tersebut meliputi perluasan dan pelestarian 'ketaatan sukarela' dari kelompok yang didominasi oleh kelompok yang menguasai melalui pemanfaatan kekuasaan intelektual, moral dan politik. Melalui hegemoni, penyebaran (distribusi) ide, nilai, belief system –dipenetrasi "seakan-akan wajar". Dalam hal ini hegemoni merupakan dinamisasi penciptaan cara berpikir terhadap wacana tertentu sebagai sesuatu yang benar dan yang lain salah, terjadi rasionalisasi yang memanfaatkan kekuasaan.

Gramsci melakukan analisi mengenai hubungan berbagai kekuatan politik. Dalam pemunculan kelas kapitalis / elit korporat, Gramsci membedakan tiga fase perkembangan kesadaran politik kolektif dalam mencapai hegemoni. Dua fase yang pertama adalah fase ekonomi-korporasi, sedang yang ketiga adalah fase hegemonik.²¹ Fase pertama, terjadi ketika seorang pedagang merasa perlu berdiri sejajar dengan pedagang lain, pengusaha dengan pengusaha lain, dan sebagainya. Belum ada solidaritas antar pedagang dengan pengusaha, mereka belum menyadari kebutuhan untuk bergabung untuk membentuk kelas yang sama. Fase kedua, fase yang lebih maju dimana telah tumbuh kesadaran akan kepentingan

²¹ Roger Simon (1999), *ibid.* hal. 34

wewenang adalah keabsahan kewenangan dari segi fungsi. Legitimasi subjek wewenang adalah dasar absah wewenang individu atau kelompok untuk membuat dan melaksanakan wewenang kekuasaan. Legitimasi subjek wewenang terbagi dalam tiga ragam legitimasi, yaitu legitimasi religius, legitimasi elitier dan legitimasi demokratis. Legitimasi dibutuhkan untuk mengaburkan hegemoni yang dilakukan kelas penguasa / elit. Legitimasi menjadi 'surat izin' untuk setiap tindakan sehingga bisa dianggap sah, tidak peduli itu salah atau benar. Dalam kasus ini, George W. Bush dan kelompoknya berhasil memperoleh legitimasi dengan memenangkan Pemilu Presiden 2000.

Dalam kerangka hegemoni elit , dimana elit sering sengaja dikaburkan sebagai negara, elit menjadi kelompok utama yang memegang dan menjalankan kekuasaan dimana cenderung memunculkan dominasi atau penguasaan terhadap hak-hak rakyat serta penguasaan terhadap alat-alat negara. Elit menggunakan ruang-ruang monopoli negara seperti pemaksaan dengan menggunakan perangkat dan wewenang negara, kekerasan , propaganda, atau menciptakan ketakutan untuk mengendalikan masyarakat diluar kelompoknya demi mewujudkan ideologi kelompok dan mencapai tujuan utama. Itu artinya, hegemoni elit berlawanan dengan demokrasi, bahkan bisa menghancurkan demokrasi itu sendiri. Hegemoni elit mengartikulasikan kepentingan kelompok pemegang kekuasaan sebagai kepentingan seluruh masyarakat. Gramsci mengatakan bahwa memang benar negara dilihat sebagai alat dari sebuah kelas tertentu, yang bertujuan untuk menciptakan kemudahan-kemudahan bagi pengembangan kelas tertentu ini.²²

Melalui konsep ini, bisa diketahui bagaimana kelompok elit yang dipimpin George W. Bush melakukan hegemoninya terhadap bangsa Amerika Serikat, bagaimana hegemoni ini telah menciderai kehidupan demokrasi bangsa Amerika Serikat dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi Amerika Serikat ini sendiri. Impian kelompok elit ini menjadikan bangsanya sendiri sebagai korban. Pemanfaatan wewenang oleh George W. Bush dan kelompoknya seperti membuat program keamanan pemerintah dengan memata-matai warga, menginvestigasi rumah-rumah warga hanya dengan alasan kecurigaan, meliburkan organisasi sosial umat Islam, membuka surat elektronik para warga tanpa surat izin, bahkan Penggunaan kekuatan elit-korporat untuk menekan media massa yang seharusnya independen guna mendukung kebijakan-kebijakan George W. Bush merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang telah mengekang kebebasan dan mematikan hak-hak sipil warga Amerika Serikat.

F. Hipotesis

Dari uraian latar belakang, dilanjutkan dengan deskripsi singkat teori dan konsep demokratisasi, teori elit dan konsep hegemoni diatas, penulis mencoba mengambil hipotesis bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya Krisis demokrasi Amerika Serikat pada masa pemerintah George W. Bush (2000-2004) adalah :

Adanya hegemoni elit, dalam hal ini elit korporat dan elit politik (George W. Bush dan Neo-Konservatif) dalam kehidupan bernegara dan kehidupan berdemokrasi Amerika Serikat, dimana kelompok yang berkuasa ini melihat Amerika Serikat dalam cara pandangnya sendiri, dalam pola pikir kelompok sehingga meupakan prinsip-prinsip dasar negaranya sebagai sebuah negara demokrasi, dengan indikasi :

1. Terjadi pelanggaran terhadap kebebasan berbicara (*freedom to speech*)
2. Terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama (*freedom to religion*)
3. Terjadi pelanggaran terhadap kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*)
4. Terjadi pelanggaran terhadap kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*)

Hegemoni elit politik dan kapitalis dirasakan masyarakat Amerika Serikat diantara sadar dan tidak sadar, kekuatan elit politik dan elit korporat / kapitalis menjadi sebuah kesatuan dalam menjaga kepentingan dan ambisi mereka. Pemanfaatan kewenangan dalam kerangka legitimasi negara melemahkan kemampuan masyarakat untuk melawan hegemoni ini. Hegemoni kapitalis seolah mendikte bahwa peran negara adalah mempertahankan kontrak, menjamin kekuatan pasar tidak terdistorsi, dan yang paling penting menyediakan lingkungan terbaik bagi bisnis untuk tumbuh subur, sehingga terbentuk lah mindset bahwa urusan Amerika Serikat adalah urusan bisnis sebagai jalan untuk mendominasi dunia dalam payung Amerika Serikat. Hegemoni elit mengajak masyarakat Amerika Serikat untuk berkata 'wajar' pada setiap tindakan elit. Pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi, *Four Freedoms*, membawa kehidupan

G. Jangkauan Penelitian

Untuk Lebih memfokuskan pembahasan, maka penulis membatasi penulisan penelitian ini pada masalah yang menyangkut hegemoni elit, dalam hal ini George W. Bush dan kelompok Neo-Konservatifnya yang juga didukung oleh Elit Korporat / Kapitalis, pelanggaran-pelanggaran demokrasi yang berdampak pada krisis demokrasi Amerika Serikat selama masa pemerintahan George W. Bush dari tahun 2000 sampai 2004 (periode pertama pemerintahan George W. Bush). Dalam penulisan ini, sebagai unit analisa untuk mempertegas batasan analisa, penulis mendefinisikan krisis demokrasi sebagai antitesis dari prinsip-prinsip dasar demokrasi bangsa Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan *four freedoms*. Dimana krisis terjadi ketika rumusan ideal demokrasi tidak tercermin sama sekali atau terjadi penyimpangan akan rumusan ideal tersebut.

Dalam lingkup waktu, tidak menutup kemungkinan penulis akan mengambil contoh pelanggaran terhadap demokrasi diluar masa itu sebagai bahan pembandingan untuk memperkuat analisa penulis.

H. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data sekunder dengan metode studi pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, diktat, jurnal, artikel, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan seperti internet. Kemudian data yang diperoleh penulis akan dianalisa

I. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan terperinci dalam masing-masing bab dijelaskan dalam sub-sub bab. Setiap bab, dalam pembahasannya memiliki saling keterhubungan guna membentuk suatu karya ilmiah yang sistematis.

Bab I. Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi tentang alasan pemilihan judul penulisan penelitian ini, tujuan penulisan, latar belakang masalah penelitian ini, pokok permasalahan yang diteliti, kerangka dasar pemikiran atau teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi, hipotesis atau kesimpulan awal yang ditarik dari latar belakang yang dianalisa dengan kerangka teoritik yang telah ditetapkan, jangkauan penelitian untuk membatasi penelitian agar memiliki batasan yang jelas, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memaparkan penelitian ini secara ilmiah, sistematis, dan runtut.

Bab II. Peran Elit Korporat Dalam Pertumbuhan Demokrasi Amerika Serikat

Bab ini memberikan penjelasan apa itu elit korporat, bagaimana perjalanan elit korporat dalam negara kapitalis sekaligus demokratis seperti Amerika Serikat. Bab ini juga membahas bagaimana posisi elit korporat dalam politik Amerika Serikat, bagaimana elit korporat memanfaatkan kekuatannya dan mencapai

Bab III. Elit Politik dalam kehidupan demokrasi Amerika Serikat

Bab ini berisi deskripsi tentang kelas elit politik dalam kehidupan berdemokrasi di Amerika Serikat dan juga kelas lain yang ada dalam masyarakat. Bab ini menganalisa kelompok elit politik dalam pemerintahan George W. Bush seperti partai Republik dan kelompok Neo-Konservatif, serta kepentingan-kepentingan mereka sebagai kelas penguasa dalam pemerintahan George W. Bush.

Bab IV. Hegemoni Elit Terhadap Praktik Demokrasi Amerika Serikat

Bab ini akan menganalisa bagaimana hubungan elit korporat dan elit politik sebagai kelas penguasa (*The Rulling Class*) dalam pemerintahan George W. Bush. Bab ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi bangsa Amerika Serikat (*Four Freedoms*) sebagai akibat dari hegemoni elit yang akhirnya akan menciptakan krisis pada demokrasi Amerika Serikat itu sendiri.

Bab V. Kesimpulan